

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2007-2011

Ayu Febriyanti Puspitasari

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

JL.MT. Haryono 165 Malang

Ayu.febriyanti92@gmail.com

ABSTRACT

The study was conducted to analyze the financial performance of the local government of Malang City in last five years (2007-2011) with a ratio analysis of financial independence, effectiveness and efficiency of the PAD, the ratio of routine expenditure to total expenditure, the ratio of development expenditure to total expenditure, growth ratios, as well as aspects of the analysis financing.

Keyword : Financial performance, Ratio Analysis, APBD, Malang City, Revenue, Expenditure, Financing

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 kota Malang memikul suatu tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat kota Malang sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* maupun non finansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Didalam penilaian indikator kinerja minimal ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu : penyimpangan antara

realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, efisiensi Biaya, efektivitas program dan pemerataan dan keadilan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah: Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang selama lima tahun terakhir (Tahun 2007-2011) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja rutin terhadap total belanja, rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, rasio pertumbuhan, serta analisis aspek pembiayaan.

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang selama lima tahun terakhir (2007-2011) dengan analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja rutin terhadap total belanja, rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, rasio pertumbuhan, serta analisis aspek pembiayaan.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi

pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- e. Bunga
- f. Subsidi
- g. Hibah
- h. Bantuan sosial
- i. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- j. Belanja tidak terduga

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah
- c. Pemberian pinjaman

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut M. Yusuf (2010 :1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen asset yang tercerminkan dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

financial maupun nonfinansial (Ihyaal Ulum, 2012 :20). Menurut Halim (2004:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi Biaya
3. Efektivitas Program
4. Pemerataan dan Keadilan

Menurut Widodo dalam Halim (2002:L5) terdapat beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Bantuan Pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam tabel seperti tampak pada Tabel berikut ini :

Tabel Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber :Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2001:168

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahsun (2006: 187) rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi Riil Daerah}}$$

Tabel Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	X<100%
Efektif Berimbang	X=100%
Efektif	X>100%

Sumber : Moh.Mahsun, 2006

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}}$$

Tabel Efisiensi Keuangan Daerah

times	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisien	$X < 100\%$

Sumber : Moh.Mahsun, 2006

c. Rasio Belanja rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Menurut Widodo dalam Halim (2002:L8) secara sederhana rasio aktivitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio Belanja Pembangunan

$$\text{terhadap APBD} = \frac{\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}}{\text{Total APBD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Ihyaul Ulum (2009:33) rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode

Realisasi penerimaan PAD =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Rasio pertumbuhan Σ pendapatan =

$$\frac{\frac{\text{Realisasi penerimaan } \Sigma \text{ pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan } \Sigma \text{ pendapatan } X_{n-1}}}{\Sigma \text{ pendapatan } X_{n-1}}$$

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan =

$$\frac{\frac{\text{Realisasi belanja pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi belanja pembangunan } X_{n-1}}}{\text{Realisasi belanja pembangunan PAD } X_{n-1}}$$

Keterangan :

X_n = Tahun Yang dihitung
 X_{n-1} = Tahun Sebelumnya

e. Tinjauan Peneliti Terdahulu

1. Ahzir Erfa (2008) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara).
2. Sri Haryati (2006) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul : Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998- 2000
3. Martha Yurdila Janur (2009) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. Judul : Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003 – 2007

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif digunakan

untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono 2007:47).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Banjarbaru dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Bappeda Kota Malang dan Bappeda g dan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola keuangan pemerintah kota Malang. BPKAD kota Malang berlokasi di Jalan tugu No 1 Kota Malang. Sedangkan Dispenda kota Malang berlokasi di perkantoran terpadu kota Malang Gedung B Jalan Myjen Sungkono Kota Malang

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai satu-satunya jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi.

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dari dokumen resmi pemerintah daerah kota Malang. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran kota Malang yaitu untuk tahun 2007-2011 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Publikasi DJPK Kemenkeu, data statistik kota Malang dalam angka periode 2007-2011, data dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kota Malang serta data realisasi pendapatan daerah kota Malang dari dinas pendapatan kota Malang. Selain itu informasi pendukung berasal dari hasil wawancara dengan staf bagian akuntansi BPKAD

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) kota Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara *Logging data*, yaitu saat pengumpulan data. Pada tahapan terakhir ini proses mengumpulkan data penelitian yang diperlukan, maka menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur guna menggali pandangan dan informasi dari obyek yang diteliti dari informan tersebut. Informan pada penelitian ini adalah Staff Bagian Akuntansi dan bendahara pengeluaran BPKAD kota Malang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau *mengcopy* dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dokumen yang diperlukan antara lain : Laporan Realisasi Anggaran APBD kota Malang tahun 2007-2011, Laporan perincian PAD kota Malang tahun 2007-2011 dari SKPD Dispenda Kota Malang, Dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD) kota Malang tahun 2011, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dari Bappeda kota Malang.

Metode Analisis Data

Menurut teori Moh.Mahsun (2006 :154) tahap-tahap analisis

data anggaran diuraikan sebagai berikut :

1. Siapkan data-data Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
2. Bandingkan Data-Data Realisasi Anggaran Dengan Anggaranya Untuk Setiap *Item* Yang Sama.

3. Hitung Selisih Anggaran
4. Hitung Persentase Tingkat Ketercapaian Anggaran
5. Lakukan *Analytical Procedure* Dengan Pembuatan rasio-rasio Kinerja

PEMBAHASAN dan HASIL ANALISIS

Gambaran Umum Kota Malang

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi $112.06^0 - 112.07^0$ BujurTimur , $7.06^0 - 8.02^0$ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. KarangplosoKab. Malang
- Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. TumpangKabMalang
- Sebelah Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang
- Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. DauKabMalang.

Gambaran Umum PDRB Kota Malang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah(*GovernmentExpenditure*) yang terdiri dari DAU, DAK, DBH dan PAD.

Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu PDRB dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan/berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar (konstan) tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar penghitungan adalah tahun 2000. Perkembangan PDRB Kota Malang tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tertera pada Tabel berikut :

Tabel PDRB Kota Malang Tahun 2007-2011

NO	TAHUN	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas dasar harga konstan
1	2007	Rp 26.928.769.040.000,00	Rp 11.394.155.940.000,00
2	2008	Rp 24.392.090.740.000,00	Rp 12.100.269.470.000,00
3	2009	Rp 24.392.090.740.000,00	Rp 12.100.269.470.000,00
4	2010	Rp 30.802.611.880.000,00	Rp 13.076.224.931.000,00
5	2011	Rp 30.802.611.880.000,00	Rp 13.076.224.931.000,00

Sumber : Malang Dalam Angka 2007-2011 (Data Diolah)

HASIL TABULASI DAN ANALISIS DATA RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007-2011

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

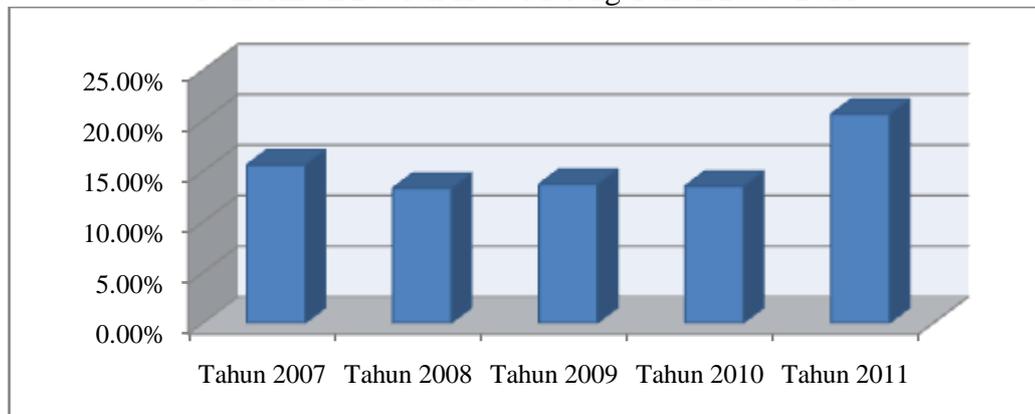
Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Malang berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2007-2011 :

Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2007-2011

URAIAN	Rasio Kemandirian (%)	Pertumbuhan Rasio Kemandirian (%)
Tahun 2007	15.62%	-
Tahun 2008	13.32%	-14,72%
Tahun 2009	13.71%	2,93%
Tahun 2010	13.52%	-1,39%
Tahun 2011	20.63%	52,59%

Sumber : Data Diolah 2012

Gambar Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah 2012

Kota Malang dengan rasio kemandirian daerah rata-rata dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2007-2011 yang mencapai 15,36% mengintrepetasikan pola kemandirian yang masih instruktif. Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah daerah kota Malang dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer kota Malang yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasiumum, danaalokasikhusus, transfer pemerintah pusat-lainya, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, transfer pemerintah

propinsi, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainnya yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil analisis data yang tersaji pada tabel diatas pada dasarnya pendapatan transfer daerah kota Malang didominasi oleh perolehan transfer pemerintah pusat atau yang sering disebut sebagai dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat pada tahun 2007 mencapai Rp 507.367.762.441,00, tahun 2008 mencapai Rp566.486.946.439,00, tahun 2009 mencapai Rp599.009.597.671,00, tahun 2010 mencapai Rp 626.023.144.999,00 dan tahun 2011 mencapai Rp 646.871.523.364,00. Berdasarkan analisis *time series* tersebut dapat terlihat peningkatan persentase pendapatan dana perimbangan kota Malang dari pemerintah pusat. Pada

tahun 2008 terjadi peningkatan pendapatan dana perimbangan sebesar 11,65%. Tahun 2009,2010, dan 2011 peningkatan pendapatan dana perimbangan tidak terlalu signifikan hanya sebesar 5,74%, 4,51%, 3,33%. Jika dianalisis dari pendapatan dana alokasi umum dari transfer APBN, pertumbuhan dana alokasi umum kota Malang dapat dikatakan fluktuatif. Tahun 2007 dana alokasi umum kota Malang mencapai Rp417.300.000.000,00 kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp473.050.489.000,00 pada tahun 2008. Tahun 2009 DAU kota Malang mengalami penurunan menjadi Rp471.739.208.000,00

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berikut ini hasil analisis rasio efektifitas keuangan pemerintah daerah kota Malang berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2007-2011 :

Tabel Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011

	Rasio Efektifitas	Pertumbuhan
Tahun 2007	105,12%	
Tahun 2008	101,45%	-3,49%
Tahun 2009	99,68%	-1,74%
Tahun 2010	108,30%	8,65%
Tahun 2011	114,47%	5,69%

Sumber : Data Diolah 2012

Pada tahun 2007 dengan rasio efektifitas keuangan daerah kota Malang yang mencapai 105,12% dapat dikatakan “efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 kota Malang dapat mengefektifkan realisasi PAD nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik. pada tahun 2008 dengan rasio efektifitas keuangan daerah kota

sedangkan tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi Rp494.910.987.000,00 dan Rp533.491.887.000,00.

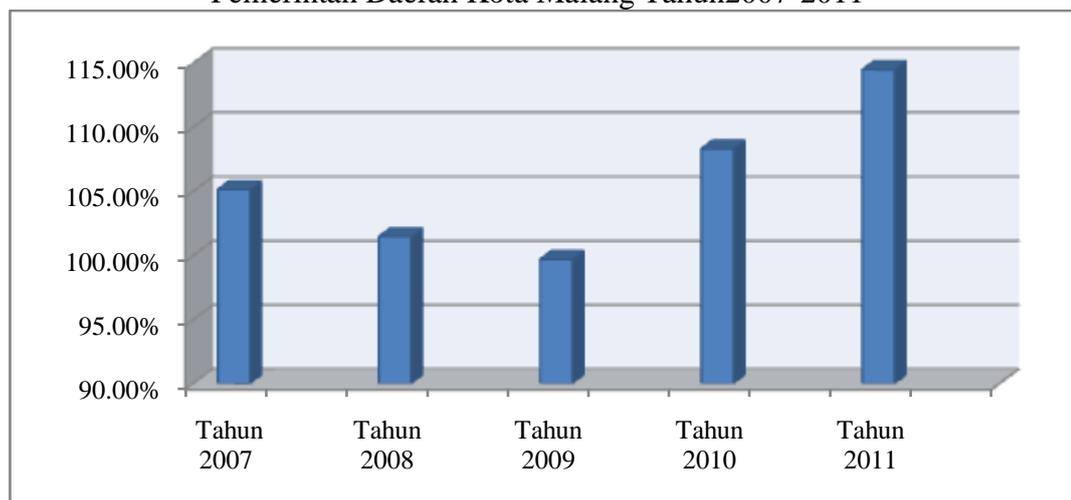
Jadi dapat disimpulkan bahwa pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Penjabaran lebih rinci terkait proses dan hasil perhitungan rasio kemandirian ini dapat dilihat pada lampiran 6.

Malang yang mencapai 101,45 % termasuk dalam kategori “efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 kota Malang masih dapat mengefektifkan realisasi PAD nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik. Tahun 2009 kota Malang kurang dapat mengefektifkan realisasi PAD nya yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan

retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan kurang baik. Pada tahun 2010 dengan rasio efektifitas keuangan daerah kota Malang yang mencapai 108,30% dapat dikatakan “efektif”. Jika melihat tren kecenderungan penurunan rasio PAD pada dua tahun sebelumnya maka dapat dijustifikasi bahwa tahun 2010 rasio efektifitas keuangan daerah kota Malang “efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 kota Malang masih dapat mengefektifkan realisasi PAD nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik .Pada tahun 2011 dengan rasio efektifitas keuangan daerah kota Malang yang mencapai 114,47% dapat dikatakan “efektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 kota Malang masih dapat mengefektifkan realisasi PAD nya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, Pendapatan hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dengan baik. Berikut ini gambar yang mengintrepetasikan hasil rekapitulasi rasio efektifitas keuangan daerah kota Malang serta tren pergerakannya dari tahun 2007 hingga tahun 2011 :

Grafik Rasio Efektivitas Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah 2012

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berikut ini hasil analisis rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2007-2011:

Tabel Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011

URAIAN	Rasio Efisiensi (%)	Pertumbuhan Rasio Efisiensi (%)
Tahun 2007	94,91%	
Tahun 2008	96,89%	2,09%
Tahun 2009	101,29%	4,54%
Tahun 2010	97,94%	-3,31%
Tahun 2011	95,49%	-2,50%

Sumber : Data Diolah 2012

Pada tahun 2007 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang yang mencapai 94,91% termasuk dalam kategori “efektif”. Komponen dari total belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan komponen dari pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tahun 2008 ini peningkatan realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada perolehan realisasi pendapatan daerah. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang tahun 2008. Pada tahun 2009 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang yang mencapai 101,29%. termasuk dalam kategori “tidak efektif”. Peningkatan rasio efisiensi tahun 2009 ini karena terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp89.496.613.955,78 dan Rp121.854.460.002,68. Semakin tinggi rasio efisiensi keuangan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan pada daerah tersebut. Pada tahun 2009 ini peningkatan realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada

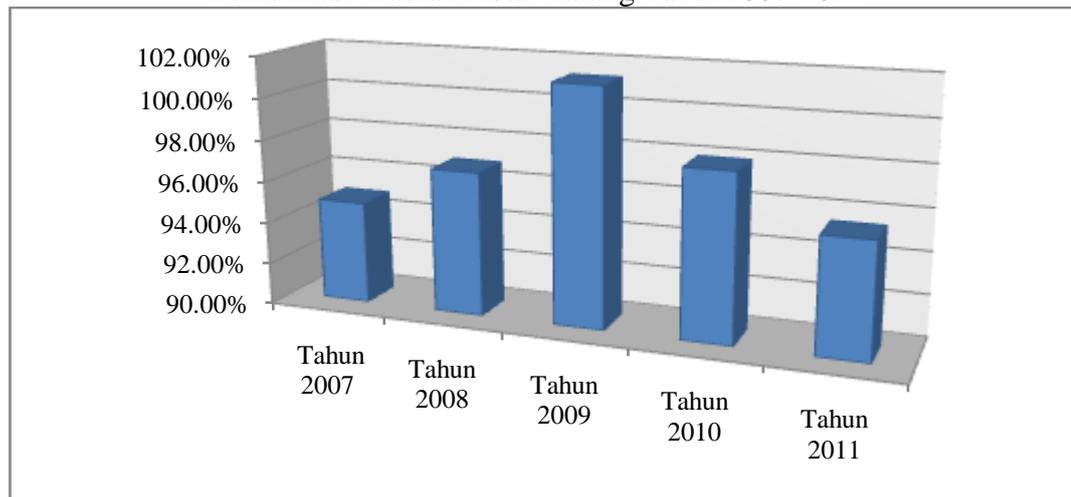
perolehan realisasi pendapatan daerah. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang tahun 2009.

Penurunan rasio efisiensi tahun 2010 ini karena terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp189.459.401.648,57 dan Rp158.839.459.122,68 . Pada tahun 2010 ini terjadi penurunan rasio efisiensi yang artinya bahwa pengelolaan keuangan kota Malang semakin efisien. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan perolehan pendapatan daerah lebih besar daripada realisasi belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah kota Malang tahun 2010 termasuk kategori “efisien”. Justifikasi atas perolehan persentase rasio efisiensi tersebut adalah pada tahun 2011 rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang yang mencapai 95,49%. termasuk dalam kategori “efektif”. Penurunan rasio efisiensi tahun 2011 ini karena terjadi peningkatan pada pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp109.400.914.120,98 dan Rp80.263.477.509,43 . Pada tahun 2011 ini terjadi penurunan rasio efisiensi

yang artinya bahwa pengelolaan keuangan kota Malang semakin efisien. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan perolehan pendapatan daerah lebih besar daripada realisasi belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah kota Malang tahun 2011 termasuk

kategori “efisien”. Penjabaran terkait proses perhitungan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang tahun 2007-2011 dapat dilihat pada lampiran 8. Berikut grafik yang merepresentasikan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah kota Malang tahun 2007-2011 dan tren pergerakannya :

Grafik Rasio Efisiensi Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah 2012

Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja

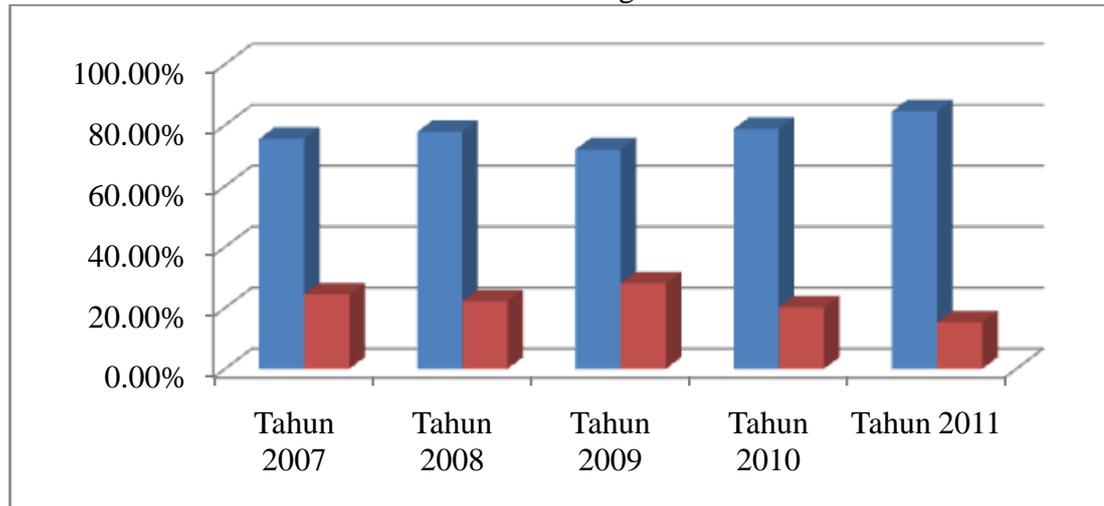
Berikut ini hasil perhitungan rasio aktivitas yang meliputi rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total Belanja kota Malang tahun 2007-2011 :

Tabel Perhitungan Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Terhadap Total Belanja
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011

URAIAN	Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja(%)	Pertumbuhan Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja(%)	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja (%)	Pertumbuhan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja (%)
Tahun 2007	75,44%	-	24,45%	-
Tahun 2008	77,78%	3,11%	22,18%	-9,28%
Tahun 2009	71,97%	-7,48%	28,02%	26,31%
Tahun 2010	78,78%	9,47%	20,16%	-28,05%
Tahun 2011	84,48%	7,24%	15,28%	-24,21%

Sumber : Data Diolah 2012

Grafik Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah (2012)

Rasio Pertumbuhan (*Growth ratio*)

Berikut hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja pada APBD Kota Malang tahun 2007-2011 :

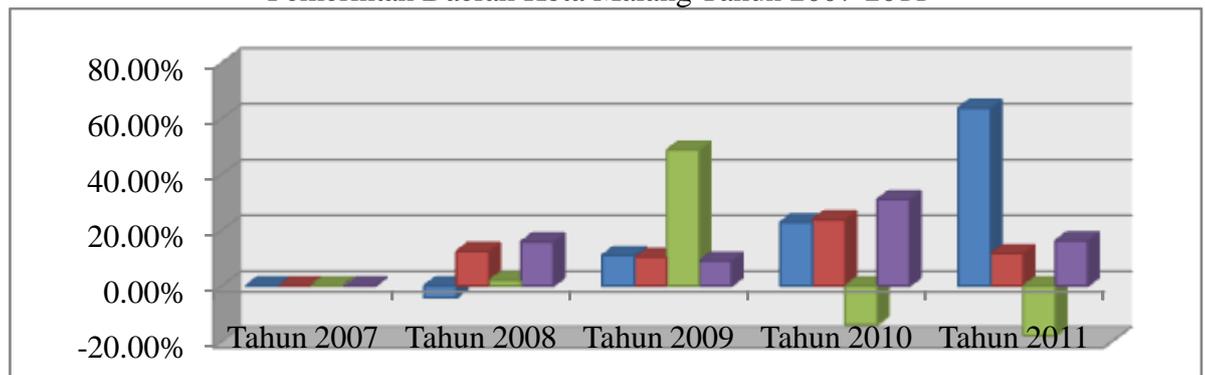
Tabel Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011

URAIAN	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pembangunan	Pertumbuhan Realisasi Belanja Rutin
Tahun 2007	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tahun 2008	-4,26%	12,34%	1,88%	15,80%
Tahun 2009	10,88%	10,29%	48,70%	8,92%
Tahun 2010	22,74%	23,72%	-13,93%	30,95%
Tahun 2011	63,71%	11,57%	17,92%	16,13%

Sumber : Data Diolah 2012

Berikut grafik yang mengintrepetasikan rasio pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, PAD dan belanja daerah Kota Malang tahun 2007-2011 :

Grafik Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, PAD dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah 2012

Analisis Aspek Pembiayaan Kota Malang

Berikut hasil analisis aspek pembiayaan APBD Kota Malang baik dari sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dengan melihat tren pertumbuhannya :

Tabel Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pembiayaan APBD Kota Malang
Tahun 2007-2011

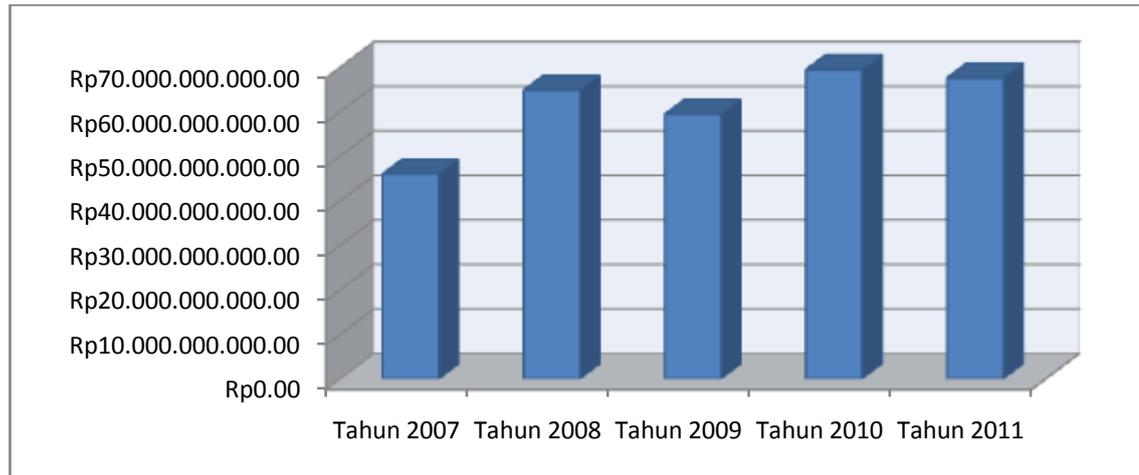
URAIAN	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Penerimaan Pembiayaan Daerah					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp46.013.481.995,53	Rp64.822.253.488,30	Rp59.420.938.781,04	Rp69.429.062.441,70	Rp67.571.686.021,77
Pencairan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp7.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Penerimaan Piutang Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Dana Talangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp46.013.481.995,53	Rp72.322.253.488,30	Rp84.420.938.781,04	Rp69.429.062.441,70	Rp67.571.686.021,77

Sumber : BPKAD Kota Malang (2012)

Berdasarkan tabel diatas SILPA yang muncul pada penerimaan pembiayaan di realisasi pembiayaan tahun 2007-2011 merupakan penggunaan dana sisa kelebihan anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit. Meningkatnya pertumbuhan SILPA pada tahun 2007, 2010 dan 2011 menunjukkan terjadinya surplus. Hal ini

merupakan tanda bahwa kinerja keuangan semakin meningkat karena keadaan keuangan yang semakin baik. Peningkatan tren keadaan keuangan otomatis menurunkan penggunaan SILPA sehingga saldo SILPA meningkat. Berikut ini grafik yang mengilustrasikan tren pertumbuhan SILPA Kota Malang tahun 2007-2011 :

Gambar Pertumbuhan Realisasi Penggunaan SILPA Kota Malang
Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah, 2012

Berikut ini tabel yang menyajikan pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan kota Malang tahun 2007-2011 :

Tabel Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan APBD Kota Malang
Tahun 2007-2011

URAIAN	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan	Rp7.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp2.759.162.000,00	Rp2.200.000.000,00	Rp3.500.000.000,00	Rp6.500.000.000,00	Rp0,00
Pembayaran Pokok Hutang	Rp3.728.704.164,64	Rp47.694.236.414,64	Rp1.204.146.414,64	Rp15.677.830.625,12	Rp104.254.409,01

Sumber : BPKAD Kota Malang (2012)

Lanjutan Tabel Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan APBD Kota
Malang
Tahun 2007-2011

URAIAN	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Dana Talangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp13.987.866.164,64	Rp49.894.236.414,64	Rp4.704.146.414,64	Rp22.177.830.625,12	Rp104.254.409,01

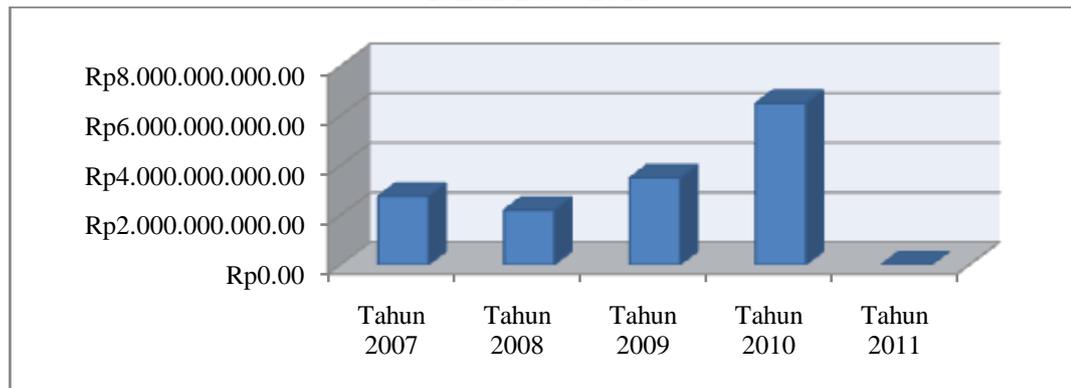
Sumber : BPKAD Kota Malang (2012)

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2007-2011. Aspek yang paling menonjol

adalah aspek penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok hutang pemerintah kota Malang. Aktivitas investasi keuangan pemerintah kota Malang adalah investasi permanen berupa penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan daerah. Perkembangan nilai investasi tersebut selalu meningkat. Hal ini

menunjukkan peran aktif pemerintah dalam membantu memajukan perusahaan-perusahaan daerah. Selain itu pemerintah kota Malang juga menunjukkan tidak adanya aktivitas divestasi atau privatisasi untuk melepas aset daerah. Berikut grafik yang menyajikan data realisasi pertumbuhan penyertaan modal kota Malang tahun 2007-2011 :

Grafik Pertumbuhan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Kota Malang Tahun 2007-2011

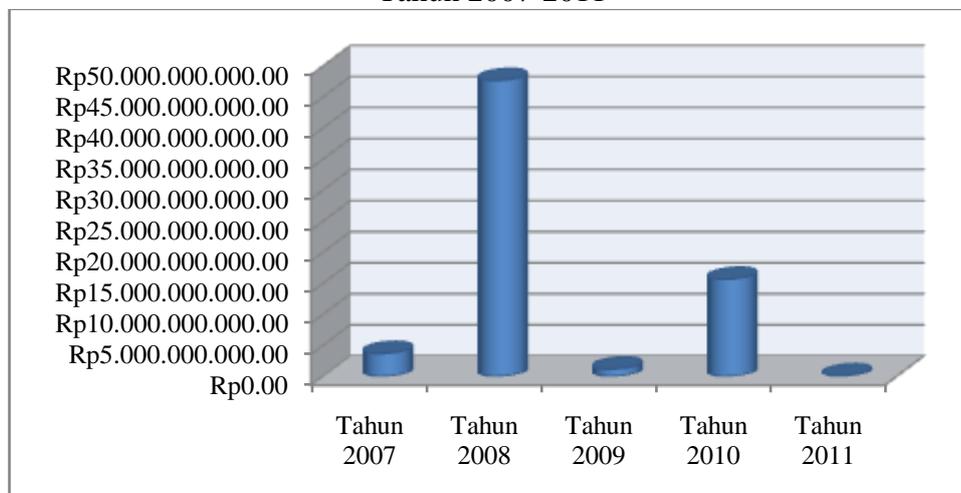


Sumber : Data Diolah, 2012

Pemerintah Kota Malang juga tidak mempunyai hutang jangka panjang. Hutang yang dimiliki hanya hutang jangka pendek yang berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan

utang jangka pendek lainnya. Berikut ini grafik yang menyajikan data realisasi pembayaran pokok hutang jangka pendek pemerintah kota Malang tahun 2007-2011 :

Grafik Pertumbuhan Realisasi Pembayaran Pokok Hutang Kota Malang Tahun 2007-2011



Sumber : Data Diolah, 2012

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.

Jadi secara keseluruhan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Batasan Penelitian

- ✓ Bahwa pada rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah yang seharusnya membandingkan antara upah pungut PAD dengan realisasi pendapatan maka upah pungut PAD diganti dengan realisasi total belanja daerah menurut Mahsun (2006 :187). Karena keterbatasan peneliti untuk mengakses data ke masing-masing SKPD dan menjumlahkan seluruh upah pungut PAD dari masing-masing SKPD dimana data tersebut tidak dapat diakses karena masuk dalam SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pemerintah Kota Malang. Hal ini

dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

- ✓ Keterbatasan data laporan realisasi anggaran tahun 2012 yang belum dapat dipublikasikan atau diberikan ke publik karena belum melalui proses audit dari BPK karena waktu penelitian berlangsung awal tahun anggaran 2013. Sedangkan audit BPK dilaksanakan hingga bulan Juni 2013. Sehingga peneliti memberikan solusi dengan mundur 1 tahun anggaran yaitu mulai tahun 2007-2011. Hal ini mohon menjadi pertimbangan dari peneliti selanjutnya dalam menetapkan waktu penelitian.

Saran dan Rekomendasi

- ✓ Pemerintah Kota Malang sebaiknya memperbaiki penganggarannya dengan cara melihat data perkembangannya, minimal selama lima tahun terakhir. Menggunakan data yang telah diperbarui dan diverifikasi agar perencanaan dan prediksinya lebih akurat.
- ✓ Optimalisasi PAD khususnya kepada sumber pendapatan yang berpotensi prima dengan memberikan bantuan dana, berperan aktif melakukan pembimbingan dan pemecahan masalah serta memperhatikan perkembangannya.
- ✓ Meningkatkan pembangunan pada sektor utama yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat.
- ✓ Pertumbuhan belanja rutin sebaiknya ditekan sebaliknya pertumbuhan belanja pembangunan makin

ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.

- ✓ Isu strategis *budget gender* hendaknya menjadi perhatian lebih pemerintah kota Malang terkait dengan kesetaraan anggaran daerah berbasis *gender* yang kini marak menjadi pembahasan berbagai pihak instansi pemerintahan.
- ✓ Bagi peneliti selanjutnya penetapan waktu penelitian diusahakan tidak diawal dan akhir tahun anggaran karena selain dari pihak pemda sibuk menyelesaikan laporan keuangan, data yang didapatkan terkait dengan laporan keuangan APBD kota Malang juga tidak bisa maksimal karena diperlukanya waktu audit oleh BPK sehingga data tersebut dapat keluar atau dipublikasikan.
- ✓ Untuk peneliti selanjutnya harap memperhatikan proses perhitungan rasio efisiensi karena harus menjumlahkan upah pungut PAD pada masing-masing SKPD sehingga akan mengalami kesulitan untuk mengakses data dan informasi karena kesemuanya itu sudah terintegrasi dalam SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Purwoko, 2006, *Analisa Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)*, (online), (<http://kumpulanjurnalkeuda.blogspot.com>) diakses 12 November 2012)

Ahzir Erfa, 2008, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi*

Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara), Skripsi

Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara

Anonim, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan*

Daerah, Jakarta

Anonim, 1999, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan*

Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Jakarta

Anonim, 1999, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*,

Jakarta

Anonim, 2000, *Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan*

Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta

Anonim, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan*

Daerah, Jakarta

Anonim, 2004, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun*

2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta

Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan*

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta

- Anonim, 2005, *Pendahuluan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*, Universitas Negeri Sumatera Utara
- Anonim, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Anonim, 2007, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Anonim, 2007, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Singaraja Tahun Anggaran 2003-2007*, (online), (<http://kumpulanskripsi.blogspot.com> diakses : 13 November 2012)
- Anonim, 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta
- Anonim, 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta
- Anonim. 2010, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Bandung : Yrama Widya
- Anonim, 2010, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo selama lima tahun terakhir (2005 – 2010) berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, debt service coverage ratio (DSCR), serta rasio pertumbuhan, PDRB dan ketenagakerjaan*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar
- Anonim, 2011, *Himpunan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2011*, Malang
- Anonim, 2011, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah Tahun 2009-2011” (studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar
- Anonim, 2011, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Laporan Hasil Survey Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Anonim, 2012, *Sejarah Kota Malang*, (<http://www.malangkota.go.id> diakses 12 Januari 2013 pukul 15:05)
- Astuti, Reni, 2007, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin*

- Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, (online), (<http://www.kumpulanjurnalkeuda.blogspot.com> diakses 12 November 2012)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2007, *Malang Dalam Angka Tahun 2007*, Malang (online) (<http://www.bpsmalangkota.go.id> , diakses 21 Januari 2013 pukul 15:30)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2008, *Malang Dalam Angka Tahun 2008*, Malang (online) (<http://www.bpsmalangkota.go.id> , diakses 21 Januari 2013 pukul 15:35)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2009, *Malang Dalam Angka Tahun 2009*, Malang (online) (<http://www.bpsmalangkota.go.id> , diakses 21 Januari 2013 pukul 15:40)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2011, *Malang Dalam Angka Tahun 2011*, Malang (online) (<http://www.bpsmalangkota.go.id> , diakses 21 Januari 2013 pukul 15:45)
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Jilid 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Cresswell, John, 2010, *Research Design Third Edition*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010, *Deskripsi dan Analisis APBD Tahun 2010 DJPK Kementerian Keuangan*, Laporan Hasil Penelitian, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Dora Detisa, 2009, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Gregorius Gehi Batafor, 2011, *Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
- Halim, Abdul dkk, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Hanafi, Imam dkk, 2009, *Kebijakan Keuangan Daerah*. Malang : UB Press
- Mahsun, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Luri Wardani, 2009, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan (Studi Kasus Di Pemda Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004 -2008)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mahmudi,2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : penerbit ANDI
- Mardiasmo, 2010, *Launching Deskripsi dan Analisis APBD 2010* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : PT. Andi
- Martha Yurdila Janur,2008, *Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003 – 2007*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Miraj,Evan, 2009, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Pengelolaan APBD Dengan Metode Pengukuran Value For Money*, (Online), (<http://kumpulanjurnalkeuda.blogspot.com> diakses 12 November 2012)
- Nurchahyo,Dimas, 2010, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2006-2009*, (Online), (<http://kumpulanjurnalkeuda.blospot.com> diakses 12 November 2012)
- Pramoho Hariadi,Yanuar E Restantio Icut Rangga Bawono, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Shita Unjaswati, Sri Rahayu, Iskandar Sam, 2007, *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Sri Hayati,2006, *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998- 2000*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul Hafidz, 2009, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah Jilid 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Ulum,Ihyaul, 2012, *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahyuni,Nanik, 2007, *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2004-2006*,(online),(<http://elibuinm.alikmalang.ac.id> diakses 10 November 2012)
- Wahyuningsih, Fajar,2009.*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2004-2008*. (Online). (<http://kumpulanjurnalkeuda.blogspot.com> diakses 12 November 2012)

- Wulansari,Ratih, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*, (online), (<http://kumpulanjurnalkeuda.blogspot.com> diakses 12 November 2012)
- Yani,Achmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Yanuar Fredianto, 2010, *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Yusuf,Mohammad, 2010, *Langkah Pengelolaan Aset Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta : Salemba Empat